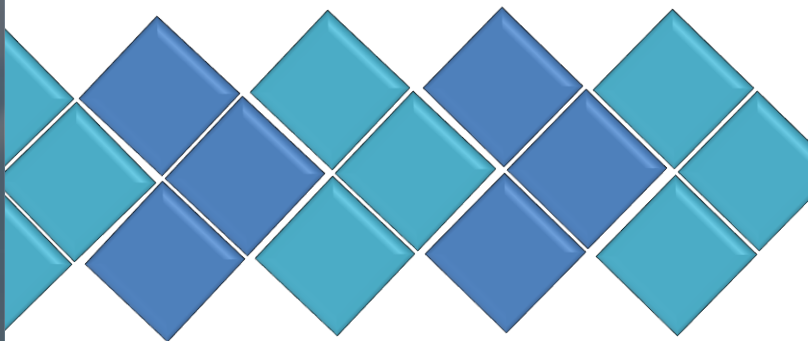


2026



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I



Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

BALAI BESAR PERAKITAN DAN
MODERNISASI PASCAPANEN
PERTANIAN



**BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Triwulan I Instansi Pemerintah Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BBPM Pascapanen) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah terhadap kinerja pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mencapai misi dan tujuan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian dalam kurun waktu tahun 2026. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya

Laporan ini memuat capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi BBPM Pascapanen selama triwulan I Tahun 2026. Pada Laporan Kinerja ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian pada triwulan I. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2026 berorientasi pada pencapaian indikator kinerja utama BBPM Pascapanen.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Bogor, 2 April 2026

Kepala Balai Besar



Dr. Suharyanto, S.P., M.P
NIP 19710613199831002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Triwulan I Tahun 2026 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BBPM Pascapanen) merupakan wujud pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Penyusunan Laporan Triwulan BBPM Pascapanen tahun 2026 merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama bulan berjalan pada tahun 2026.

Pada tahun 2026 BBPM Pascapanen memiliki 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), yaitu: 1) Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian dengan target 3,23; 2) Indeks Pemanfaatan Teknologi Pascapanen Pertanian dengan target 55,00; 3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BBPM Pascapanen (target 90,06); dan 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BBPM Pascapanen (target 92,45). Capaian setiap indikator tersebut masih belum ada di Bulan Maret, karena masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan.

Realisasi penyerapan anggaran BBPM Pascapanen berdasarkan pagu total anggaran (Rp15.918.246.000,-) sampai dengan akhir bulan Maret 2026 adalah Rp3.219.275.404,- (20,22%) atau 90,12% dari target penyerapan anggaran pada bulan Maret sebesar Rp3.572.154.000,- (22,44%). Adapun realisasi penyerapan anggaran BBPM Pascapanen berdasarkan pagu efektif anggaran (Rp15.776.693.000,-) sampai dengan akhir bulan Maret 2026 adalah Rp3.219.275.404,- (20,41%).

Kemudian secara umum untuk kendala yang dihadapi antara lain: Adanya penurunan alokasi anggaran secara signifikan dan pemblokiran anggaran pada kegiatan teknis PNBK.

Adapun langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi 1) Koordinasi intensif dengan Sekretariat BRMP dan memonitor serta memantau secara berkala terkait arahan dalam menyikapi instruksi tersebut dan melaksanakan kegiatan secara online, baik pada kegiatan teknis maupun kegiatan dukungan manajemen; 2) Memaksimalkan anggaran yang ada secara efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja; 3) Terkait aplikasi monev online masih menunggu dari pusat untuk melakukan updating serta terus melakukan komunikasi; dan 4) Memanfaatkan ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana yang ada.

Melalui Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk triwulan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis pada RENSTRA Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian Tahun 2025-2029.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Organisasi	1
1.3. Tantangan dan Peran Strategis	3
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis Organisasi	5
2.2. Perjanjian Kinerja	6
III. AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. Capaian Kinerja Utama	9
3.2. Capaian Kinerja Strategis Lainnya	11
3.3. Realisasi Anggaran	13
3.4. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya	13
IV. PENUTUP	15
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	15
4.2. Langkah-Langka Peningkatan Kinerja	15

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	Keterkaitan visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan/IKSK BBPM Pascapanen 2025 - 2029	5
Tabel 2.	Target Kinerja BBPM Pascapanen Tahun 2026	7
Tabel 3.	Program dan Anggaran BBPM Pascapanen Pertanian T.A 2026	8
Tabel 4.	Target dan Capaian Kinerja BBPM Pascapanen per Triwulan I Tahun 2026	9
Tabel 5.	Target dan Realisasi Capaian IKSK 1 BBPM Pascapanen pada Triwulan I tahun 2026	10
Tabel 7.	Nilai Indeks unit pelayanan dan Mutu Unit Pelayanan Triwulan I	10
Tabel 8.	target dan Realisasi Capaian IKSK 2.1 BBPM Pascapanen pada Triwulan I tahun 2026	10
Tabel 9.	Target dan Realisasi Capaian IKSK 4.1 BBPM Pascapanen triwulan I tahun 2026	11
Tabel 10.	Target dan Realisasi Capaian Strategis Lainnya BBPM Pascapanen Triwulan I tahun 2026	12
Tabel 11.	Realisasi Keuangan BBPM Pascapanen pada Triwulan I Tahun 2026	13

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur organisasi BBPM Pascapanen Tahun 2026	3
Gambar 2. Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Triwulan I Tahun 2026	11
Gambar 3. Survey lapang Kegiatan <i>Instore Dryer</i> untuk Pengeringan dan Penyimpanan Benih Padi	16
Gambar 4. Koordinasi internal & penjajakan terkait desain dan kebutuhan material IoT	16
Gambar 5. Survei lapang penentuan kapasitas alat yang sesuai dengan kebutuhan operasional, serta pembahasan tata letak (layout)	17
Gambar 6. koordinasi dan survei lokasi penerapan teknologi <i>Instore Dryer</i> (ID) untuk benih bawang putih	17

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai peraturan penerapan akuntabilitas yang mengacu pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian diwajibkan untuk:

- a. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi
- b. Menyampaikan Laporan Kinerja, realisasi anggaran, serta mengevaluasi program kerja setiap tiga bulan agar dapat dilakukan tindakan korektif secara cepat untuk mencapai target tahunan.

Atas dasar hal-hal di atas, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian sebagai instansi Pemerintah dan Penyelenggaran Negara telah menerapkan target kinerja tahun 2026 yang mencakup target seluruh Satker lingkup BRMP Kementan, salah satunya adalah Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BBPM Pascapanen).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian, pada Pasal 2 disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, salah satunya adalah BBPM Pascapanen pada Bagian Kelima, Pasal 26 disampaikan bahwa BBPM Pascapanen mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBPM Pascapanen menyelenggarakan fungsi: (a) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; (b) pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi pascapanen pertanian; (c) pengelolaan produk hasil perakitan pascapanen pertanian; (d) pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; (e) pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pascapanen pertanian; (f) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; dan (g) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPM Pascapanen. Tugas pokok dan fungsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang harus dimiliki oleh Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian demi kelancaran pelaksanaan tugasnya.

1.2. Kedudukan tugas, fungsi, dan organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024, nomenklatur Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian berubah menjadi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pascapanen) dan salah

satu unit pelaksana teknis di lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian RI. Selanjutnya pada tahun 2025 kembali terjadi transformasi organisasi, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), BBPSI Pascapanen Pertanian berubah menjadi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (BBPM Pascapanen). Struktur organisasi dari BBPM Pascapanen adalah sebagai berikut (Gambar 1):

BBPM Pascapanen dipimpin oleh Kepala. Pada Pasal 28, disebutkan bahwa struktur organisasi BBPM Pascapanen terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha: mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian (Pasal 29).
2. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana: mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan (Pasal 158 ayat 1). Dalam pelaksanaan tugasnya, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (Pasal 158 ayat 2). Tim kerja terdiri dari ketua tim dan anggota tim (pasal 158 ayat 3) yang melaksanakan tugas berdasarkan penugasan dari Kepala UPT (pasal 158 ayat 4). Dalam memberikan tugas kepada tim kerja, Kepala UPT harus memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas (pasal 158 ayat 5). Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 158 ayat 6). Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 158 ayat 7). Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 159 ayat 1). Jumlah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja (Pasal 159 ayat 2). Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 159 ayat 3).

Kompetensi merupakan persyaratan mutlak bagi SDM BBPM Pascapanen untuk menjamin terselenggaranya kegiatan yang berkualitas. BBPM Pascapanen memberikan prioritas tinggi terhadap peningkatan kualitas SDM dalam upaya menjamin tersedianya tenaga profesional dalam melaksanakan kegiatan teknis dan manajemen. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan BBPM Pascapanen yang terakreditasi secara berkelanjutan serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong peningkatan standar instrumen pascapanen pertanian. Pembinaan SDM antara lain dilakukan dengan mendorong setiap pegawai untuk memasuki jenjang fungsional khusus sebagai pengawas mutu hasil pertanian, analis standar, analis kebijakan, auditor, dll, dengan meningkatkan kegiatan pelatihan internal maupun eksternal, serta

melaksanakan kegiatan seminar secara berkala. Pengembangan SDM dilakukan pula dengan cara memberikan kesempatan kepada pegawai BBPM Pascapanen untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di dalam maupun luar negeri.



Gambar 1. Struktur organisasi BBPM Pascapanen Tahun 2026

1.3. Tantangan dan peran strategis

Secara umum dalam periode tahun 2025–2029, perekonomian global masih dilanda ketidakpastian. Dari sisi geopolitik dan ekonomi, masih berlanjutnya konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina, serta Israel dengan negara-negara Timur Tengah. Adanya tren pelemahan ekonomi China berpotensi menurunkan ekspor negara-negara lain ke China. Dampak perubahan iklim global, seperti yang disampaikan sebelumnya, adanya peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor terdampak. Serta adanya kebijakan proteksionisme Amerika Serikat, yaitu peningkatan tarif impor ke pasar Amerika Serikat berdampak pada penurunan volume perdagangan dunia.

Pengembangan usaha produk-produk pangan dan hasil pertanian terkait hilirisasi dan pascapanen pertanian menghadapi tantangan berat dalam persaingan global sehingga perlu kebijakan yang strategis dan operasional. Globalisasi perdagangan menuntut peningkatan daya saing produk pertanian Indonesia. Munculnya raksasa ekonomi baru seperti China, di satu sisi merupakan peluang bagi Indonesia untuk memperluas serta menganeekaragamkan produk ekspor untuk tujuan China. Kemudian munculnya negara-negara yang bertumpu pada ekspor seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand merupakan tekanan terhadap produk pertanian di pasar domestik maupun di pasar internasional. Oleh karena itu, perlu dicermati bagaimana dan sejauh mana peluang dan ancaman tersebut di atas mempengaruhi perkembangan pembangunan pertanian di Indonesia.

Hasil pertanian sebagian besar merupakan produk yang mudah rusak sehingga perlu sentuhan penanganan untuk meminimalkan kerusakan dan meningkatkan nilai tambahnya.

Berbagai produk hasil pertanian, memiliki karakteristik yang spesifik sehingga perlu perakitan teknologi penanganan dan pengolahan yang berbeda. Teknologi pascapanen yang meliputi teknologi penanganan dan pengolahan primer pascapanen disusun untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, tuntutan pasar dunia maupun domestik akan pascapanen untuk mutu produk pangan dan pertanian semakin tinggi, akibat munculnya berbagai kasus seperti kontaminasi aflatoksin pala, dan cemaran logam-logam berbahaya.

Salah satu cara untuk mencegah produk pertanian, perkebunan, peternakan agar tidak terkontaminasi dari berbagai cemaran dan penyakit tersebut adalah dengan menciptakan standar berbasis pada GAP (*Good Agriculture Practices*), GHP (*Good Handling Practices*) maupun GMP (*Good Manufacturing Practices*) serta sertifikasi sehingga aman untuk dikonsumsi. Tantangan pascapanen lainnya adalah kehilangan hasil pangan (*food losses*) sebagai salah satu permasalahan global. Setiap negara sepakat mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) 12, yaitu menjamin pola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan dengan mengurangi kehilangan pangan sepanjang rantai produksi dan pasokan hingga setengahnya pada tahun 2030. Selain itu, kehilangan hasil pada tahap panen memerlukan langkah penerapan teknologi/alat mesin pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil tersebut. Dengan penerapan *best practices* dan perakitan teknologi pascapanen pertanian sepanjang rantai pasok dapat menurunkan kehilangan hasil pascapanen dan memperpanjang umur simpan komoditas serta memberikan tambahan produksi dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian merupakan salah satu satuan kerja Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian memiliki peran penting dalam pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi pascapanen pertanian di Indonesia. Organisasi ini merupakan unit pelaksana teknis yang dapat menjadi sarana efektif untuk melaksanakan modernisasi sektor pascapanen pertanian melalui teknologi pascapanen pertanian siap adopsi untuk meningkatkan produktivitas, mencegah dan mengurangi kehilangan hasil panen dalam rangka menyelamatkan produksi komoditas pertanian.

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Strategi Organisasi

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dapat dicapai oleh BBPM Pascapanen dalam waktu lima tahun, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029, BRMP mendukung Kementan pada Sasaran Strategis 1: Meningkatnya pendapatan petani; Sasaran Strategis 2: Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan; dan Sasaran Strategis 7: Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi. Sasaran strategis ini menggambarkan upaya yang dilakukan BBPM Pascapanen dalam mencapai tujuan yang telah disusun dan ditetapkan. BBPM Pascapanen sebagai salah satu unit pelayanan teknis dibawah BRMP, menetapkan kondisi yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan harus berdasarkan visi, misi, dan tujuan BRMP berupa penjabaran dari visi, misi, dan tujuan Kementerian Pertanian. Selain itu, BBPM Pascapanen memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan teknis terkait perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian kepada masyarakat khususnya masyarakat pertanian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPM Pascapanen menganut nilai-nilai PESONA Paspas dalam Pelayanan yang Proaktif, Empati, Santun, Obyektif, Nyaman, dan *Agile*, dengan dua jenis layanan, yaitu: 1) Layanan Pengujian dan Kesesuaian Standar, mencakup: a) Pengujian Analisa Laboratorium, b) Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP), c) Layanan Sertifikasi Halal (LPH), d) Layanan Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa (LSPro), e) Layanan Maklon/Pemanfaatan Alat Pascapanen, dan f) Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI); dan 2) Layanan lainnya, mencakup: a) Layanan bimbingan teknis; b) Layanan magang dan praktek kerja lapang (PKL); c) Layanan informasi dan konsultasi/studi banding/kunjungan; dan d) Layanan perpustakaan khusus standar pascapanen pertanian.

BBPM Pascapanen dalam lima tahun ke depan memiliki visi menjadi **“Institusi Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pascapanen Pertanian Terapan Modern yang Unggul dan Inovatif dalam Mendukung Pertanian Maju Berkelas Dunia”**, Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan/IKSK disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Keterkaitan visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan/IKSK BBPM Pascapanen 2025 - 2029

Visi	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Target IKSK/IKU
Menjadi institusi perekayasaan dan perakitan teknologi pascapanen pertanian terapan modern yang unggul,	Melaksanakan perekayasaan dan perakitan; Merancang, menyusun, dan menguji teknologi	Menghasilkan perakitan dan perekayasaan teknologi pascapanen pertanian terapan	Indeks pemanfaatan teknologi pascapanen pertanian	Meningkatnya pemanfaatan teknologi pascapanen pertanian	Indeks pemanfaatan teknologi pascapanen pertanian

Visi	Misi	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Target IKSK/IKU
inovatif, terkemuka, akuntabel, kolaboratif, berintegritas, dan berorientasi pelayanan prima dalam mendukung pertanian maju	pascapanen; Memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil; Membangun kemitraan strategis dengan lembaga terkait	yang unggul dan bermanfaat.			
	Meningkatkan pemanfaatan standar mutu pascapanen pertanian mendukung peningkatan daya saing produk pertanian	Mewujudkan penerapan standar pascapanen pertanian yang sesuai dan berdayaguna untuk meningkatkan daya saing produk.	Persentase produk pertanian tersertifikasi dan indeks kepuasan pelanggan pengujian standar pascapanen	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian	Indeks kepuasan layanan pengujian standar pascapanen
	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan yang transparan, profesional, dan akuntabel dalam perekayasa dan perakitan teknologi pascapanen pertanian terapan	Mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme kinerja instansi pemerintah di lingkungan BBPM Pascapanen.	Tercapainya Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	Terwujudnya Birokrasi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian
			Tercapainya Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BBPM Pascapanen	Terkelolanya Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BBPM Pascapanen merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang kemudian dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk bahan acuan bagi implementasi maupun evaluasi atas implementasi pelaksanaan kegiatan. Perjanjian Kinerja BBPM Pascapanen ini juga merupakan kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh segenap pimpinan dan staf Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian pada tahun 2026.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu institusi/unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih mengutamakan terhadap berbagai program/kegiatan prioritas organisasi, yaitu kegiatan-kegiatan yang menggambarkan

keberadaan organisasi, serta menggambarkan isu-isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Pelaksanaan kontrak kinerja ini diukur pada tahun berjalan melalui pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat dicapai oleh organisasi, serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian telah membuat perjanjian kinerja tahun 2026 untuk BBPM Pascapanen sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2026. Perencanaan Kinerja BBPM Pascapanen Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2026 yang telah ditetapkan. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai BBPM Pascapanen dalam rencana kerja tahun 2026 mengacu pada dokumen perencanaan institusi induk, yaitu Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan BRMP, yang terangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Target Kinerja BBPM Pascapanen Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
UTAMA				
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan pascapanen pertanian	1.1. Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian	Indeks (1-4)	3,23
2	Terwujudnya pemanfaatan teknologi pascapanen pertanian	2.1. Indek Pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian	Indeks (0-100)	55,00
LAINNYA				
3	Terwujudnya Birokasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM oada Baai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	Nilai (0-100)	90,06
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	Nilai (0-100)	92,45

Tabel 3. Program dan Anggaran BBPM Pascapanen Pertanian T.A 2026

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO	Pagu blokir	pagu efektif	Alokasi Anggaran (total-blokir=pagu non blokir)
018.09.EC	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDRUSTRI	141.553.000	15.776.693.000	15.918.246.000
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	141.553.000	44.597.000	186.150.000
018.09.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		1.036.755.000	1.036.755.000
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	-	1.036.755.000	1.036.755.000
7912.SDA	Penelitian dan Pengembangan Produk[Base Line]	-	1.036.755.000	1.036.755.000
7912.SDA.007	Produk Teknologi Terapan Pascapanen Pertanian Modern Identifikasi	-	2.131.000	2.131.000
052	Perakitan	-	1.032.948.000	1.032.948.000
053	Uji Terap dan Adaptasi	-	1.676.000	1.676.000
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen		14.695.341.000	14.695.341.000
6918.EBA.962	Layanan Umum		14.689.071.000	14.689.071.000
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]		6.270.000	6.270.000

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Utama

Pada tahun 2026 BBPM Pascapanen sebagai organisasi telah menetapkan target kinerja Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, terdiri dari empat Sasaran Kegiatan, yakni: (1) Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian; (2) Terwujudnya pemanfaatan teknologi pascapanen pertanian; (3) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan (4) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

Tabel kendali pemantauan dan evaluasi rencana aksi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BBPM pascapanen berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan tahun 2026, seperti tertuang pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja BBPM Pascapanen per Triwulan I Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
UTAMA						
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan pengujian pascapanen pertanian	1.2. Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian	Indeks (1-4)	3,23	2,586	110,53
2	Terwujudnya pemanfaatan teknologi pascapanen pertanian	2.1. Indek Pemanfaatan teknologi pascapanen pertanian	Indeks (0-100)	55,00	0	0
LAINNYA						
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	3.1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM oada Baai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	Nilai (0-100)	90,06	0	0
4	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	Nilai (0-100)	92,45	75	69,33

1.1.1. IKSK 1: Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian

Pada tahun 2026 BBPM Pascapanen memiliki indikator kinerja berupa Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian, dengan target sebesar 3,23 (indeks skala 1-4).

Pada triwulan I tahun 2026, hasil survei pengguna layanan pengujian BBPM Pascapanen terkumpul responden sebanyak 14 orang, dari 14 responden, 13 orang memiliki pendidikan S1, 1 orang S2 dan S3, dengan jenis kelamin perempuan sebesar 50%, dan 50% laki-laki. Adapun nilai hasil survei kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian sebesar 3,568 (kategori sangat baik).

Tabel 5. Target dan Realisasi Capaian IKSK 1 BBPM Pascapanen pada Triwulan I tahun 2026

Indikator Kinerja	target	Realisasi	Presentase (%)
Indeks Kepuasan Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian	3,23	3,568	110,53

Tabel 6. Nilai Indeks unit pelayanan dan Mutu Unit Pelayanan Triwulan I

No	Uraian	Triwulan I
1	Nilai Indeks unit pelayanan	3,568
2	Nilai IKM setelah dikonevsi	89,20
3	Mutu pelayanan	A
4	Kinerja unit pelayanan	Sangat Baik

1.1.2. IKSK 2: Indek Pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian

Pada tahun 2026 BBPM Pascapanen memiliki indikator kinerja berupa Indeks Pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian, dengan target sebesar 55,00 indeks.

Pada triwulan I tahun 2026, masih dalam tahap persiapan dan koordinasi, sehingga belum ada hasil pemanfaatan teknologi pascapanen.

Tabel 7. Target dan Realisasi Capaian IKSK 2.1 BBPM Pascapanen pada Triwulan I tahun 2026

Indikator Kinerja	target	Realisasi	Presentase (%)
Indek Pemanfaatan teknologi pasca panen pertanian	3,23	-	-

1.1.3. IKSK 3: Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

Pada tahun 2026, BBPM Pascapanen menetapkan target capaian Nilai Pembangunan ZI (Zona Integritas) menuju WBK/WBBM sebesar 90,06. Capaian kegiatan dalam mendukung Pembangunan ZI di lingkungan BBPM Pascapanen pada triwulan I tahun 2026 antara lain penyusunan Laporan Kinerja 2025, penyusunan dan penandatanganan PK tahun 2026 oleh Kepala Balai Besar, penyusunan rencana aksi (renaksi), penyusunan Surat Keputusan Tim kegiatan TA 2026 dsb. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) BBPM Pascapanen diperoleh setelah dilakukan penilaian secara mandiri oleh Tim Asesor Penilaian Mandiri Pembangunan ZI BRMP atau penilaian oleh Tim Inspektorat Investigasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Tabel 8. Target dan Realisasi Capaian IKSK 3.1 BBPM Pascapanen triwulan I tahun 2026

Indikator Kinerja	target	Realisasi	Presentase (%)
Nilai Pembangunan ZI (Zona Integritas) menuju WBK/WBBM BPPM Pascapanen	90,06	-	-

1.1.4. IKSK 4: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

Pada tahun 2026, BBPM Pascapanen menetapkan target capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 92,45. Indikator pemerolehan perhitungan IKPA disajikan melalui aplikasi OM-SPAN (MONEVPA), yang dihitung berdasarkan aspek nilai kualitas perencanaan anggaran, nilai kualitas pelaksanaan anggaran, dan nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Untuk nilai IKPA pada triwulan I tahun 2026 adalah 75,00, rendahnya capaian IKPA di bulan Maret dikarenakan penilaian IKPA dari 8 indikator secara keseluruhan belum optimal. Hal ini disebabkan masih terdapat 1 indikator untuk capaian output yang belum dapat dilaksanakan, terkait belum terbitnya juknis pencatatan target/proyeksi dan realisasi capaian output 2026 dari kementerian keuangan.

Tabel 9. Target dan Realisasi Capaian IKSK 4.1 BBPM Pascapanen triwulan I tahun 2026

Indikator Kinerja	target	Realisasi	Presentase (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	92,45	75	69,33

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPB

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output				
1	03 Maret	023	018	648669	BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	0,00 25 0,00	0,00	75,00	100,00%	0,00	75,00

Gambar 2. Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Triwulan I Tahun 2026

3.2. Capaian Kinerja Strategis Lainnya

Pada tahun 2026 BBPM Pascapanen mengampu dua program teknis yaitu Program Nilai

Tambah dan Daya Saing Industri dengan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian, dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Kegiatan teknis dilaksanakan dalam bentuk aktivitas yang menghasilkan rincian output (RO) berupa Laporan Hasil Uji Instrumen Pascapanen dan Produk Teknologi Terapan Pascapanen Pertanian Modern Identifikasi dan Inventarisasi.

Tabel 10. Target dan Realisasi Capaian Strategis Lainnya BBPM Pascapanen Triwulan I tahun 2026

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keterangan
Laporan Hasil Uji Instrumen Mutu Pascapanen	215 LHU	63 LHU	29,30	<ul style="list-style-type: none"> a) Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian sebanyak 20 Laporan Hasil Uji (LHU) dengan total sampel sebanyak 29 sampel; b) Persiapan Surveilen PUP Pascapanen, membahas terkait teknis pelaksanaan surveilans dan kelengkapan dokumen dan identifikasi terhadap dokumen mutu, rekaman kegiatan, serta bukti implementasi yang perlu disiapkan dan diverifikasi sebelum pelaksanaan surveilans; c) Pelaksanaan Surveilans I PUP BRMP, Asesmen dilakukan oleh tim asesor yang ditugaskan oleh KAN terhadap aspek manajemen, sistem mutu, serta teknis penyelenggaraan uji profesiensi guna memastikan kesesuaian dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17043:2023
Produk Teknologi Terapan Pascapanen Pertanian Modern	5 Produk	-	-	<ul style="list-style-type: none"> a) Penyempurnaan desain dan spesifikasi teknis <i>Instore drying</i> untuk pengeringan dan penyimpanan benih; Melakukan cek lapangan ke lokasi yang direncanakan akan digunakan untuk instalasi <i>Instore drying</i>. b) Menyusun desain dan rancangan Gudang dan system IoT; Koordinasi eksternal (pakar/ahli, mitra kolaborator, koordinasi eksternal dengan tim pakar dari ITSB untuk membahas aspek kegiatan dari sisi IoT. c) Telah dilakukan perancangan pengering FBD melalui diskusi teknis dengan penyedia terkait desain alat pengering benih gandum; Telah dilakukan uji coba awal untuk daya tumbuh benih gandum, metode kertas kosong dan disimpan selama 8 hari dengan interval pengamatan 4 dan 8 hari d) kegiatan koordinasi dan survei lokasi penerapan teknologi <i>Instore Dryer (ID)</i> untuk benih bawang putih di BRMP Tanaman Sayuran, Lembang; Peninjauan terhadap kondisi eksisting penanganan bawang putih di lokasi. Proses pelayuan saat ini dilakukan di greenhouse dengan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Keterangan
				<p>metode penggantungan selama kurang lebih satu bulan, sedangkan penyimpanan dilakukan di gudang dengan suhu berkisar 27–28°C dan kelembapan relatif 50–60% yang dikendalikan secara manual menggunakan dehumidifier.</p> <p>e) Koordinasi dengan penyedia peralatan mengenai desain, kapasitas alat untuk memproses tepung telur ayam sebesar 25 kg per satu kali proses; Koordinasi dengan tim peternakan antara lain BRMP PKH, BRMP UAT, BRMP Mekanisasi dan BRMP Pascapanen untuk membahas kelanjutan kegiatan peternakan dimana penentuan CPCL peternak yang akan membudidayakan ayam petelur KUB; Persiapan bahan pembantu perlengkapan untuk memulai verifikasi teknologi tepung telur</p>

3.3. Realisasi anggaran

Berdasarkan revisi DIPA BBPM Pascapanen ke-3, maka realisasi penyerapan anggaran BBPM Pascapanen berdasarkan pagu total anggaran (Rp15.918.246.000,-) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah Rp3.219.275.404,- (20,22%) atau 90,12% dari target penyerapan anggaran pada Triwulan yang bersangkutan. Berdasarkan jenis belanja, pengeluaran realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Maret 2026 adalah: a) Belanja Pegawai sebesar Rp.1.813.810.343,- (26,61%); b) Belanja Barang (Operasional+non) sebesar Rp.1.405.465.061 (15,44%); Adapun realisasi penyerapan anggaran BBPM Pascapanen berdasarkan pagu efektif anggaran (Rp15.776.693.000,-) sampai dengan akhir bulan Maret 2026 adalah Rp3.219.275.404,- (20,41%). Realisasi anggaran berdasarkan pagu total dan pagu efektif seperti tertuang pada Tabel 11.

Tabel 11. Realisasi Keuangan BBPM Pascapanen pada Triwulan I Tahun 2026

Jenis Belanja	Pagu Anggaran Total (Rp)	Pagu Anggaran Efektif (Rp)	Realisasi s/d 31 Maret 2026		
			(Rp)	Persentase	
				Thd Pagu Total	Thd Pagu Efektif
Belanja Pegawai	6.817.116.000	6.817.116.000	1.813.810.343	26,61	26,61
Belanja barang	9.101.130.000	8.959.577.000	1.405.465.061	15,44	15,69
Total	15.918.246.000	15.776.693.000	3.219.275.404	20,22	20,41

3.4. Permasalahan dan Upaya pemecahannya

A. Permasalahan

- a. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Perakitan

- dan Modernisasi Pascapanen Pertanian: Pelaksanaan pembangunan ZI tidak pernah dialokasikan anggaran khusus, sementara itu pembangunan ZI merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam rangka mendukung pembangunan reformasi birokrasi;
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian masih 75%.
 - c. Adanya perubahan lokasi kegiatan perakitan menyebabkan perubahan desain teknis peralatan seperti *instore drying*.
 - d. Kendala terkait musim tanam di wilayah Lembang yang saat ini masih memasuki periode hujan, sehingga produksi bawang putih terbatas sebagai bahan baku perakitan
 - e. Bahan baku perakitan tepung telur ayam KUB belum tersedia hingga pertengahan Maret
 - f. Indikator kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 75.00, rendahnya capaian IKPA disebabkan masih terdapat 1 indikator untuk capaian output yang belum dapat dilaksanakan, terkait belum terbitnya juknis pencatatan target/proyeksi dan realisasi capaian output 2026 dari kementerian keuangan.

B. Upaya Tindak Lanjut

- a. Tiap bagian/kelompok melaksanakan kegiatan berdasarkan area yang telah ditetapkan sesuai SK tim pembangunan ZI tahun 2026;
- b. Melaksanakan kegiatan dengan selalu mengoptimalkan sumberdaya yang ada;
- c. Laporan realisasi anggaran dibuat berdasarkan pagu total dan pagu efektif sehingga ada justifikasi yang jelas terkait permasalahan realisasi anggaran;
- d. Melakukan diskusi intensif dengan BRMP komoditas (BBPM Padi) untuk melakukan beberapa penyesuaian desain dan spesifikasi teknis *Instore Drying* sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- e. Diperlukan alternatif strategi pengadaan bahan baku, baik melalui koordinasi dengan petani untuk penanaman terencana maupun pengadaan dari daerah lain seperti Tegal dengan varietas yang sesuai.
- f. Menunggu ketersediaan bahan baku telur ayam KUB pada akhir bulan Maret 2026
- g. Menunggu diterbitkan petunjuk teknis pengisian proyeksi dan realisasi capaian output 2026.

IV. PENUTUPAN

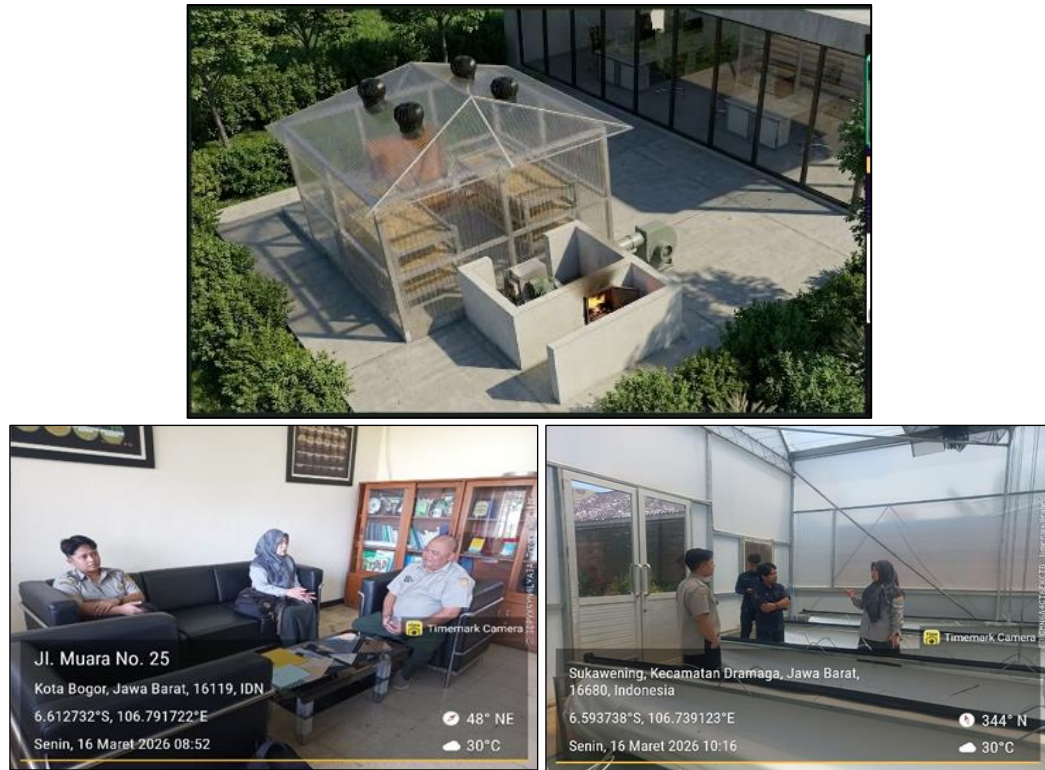
4.1. Hasil Monitoring Dan Evaluasi

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2026 dilakukan melalui pengumpulan papan skor bulanan dari setiap penanggung jawab kegiatan, dari laporan setiap penanggung jawab kegiatan direkap dan dievaluasi capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Terdapatnya blokir anggaran kode A pada pagu penggunaan PNBSP Sarana Laboratorim, sehingga anggaran belum bisa digunakan sebagian.
3. Pada Triwulan I belum terdapat realisasi target capaian nilai ZI karena belum dilaksanakannya evaluasi silang. Faktor pendukung capaian indikator ini antara lain telah ditetapkannya Tim Pembangunan ZI, Tim SPI, Tim UPR, Tim UPG, Tim Dumas, Tim Pengelola Benturan Kepentingan, Tim TPKO, Agen Perubahan, serta telah disusunnya Rencana Kerja ZI dan SOP tahun 2026.
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada bulan Maret adalah 75.00, rendahnya capaian IKPA dibulan Maret dikarenakan penilaian IKPA dari 8 indikator secara keseluruhan belum optimal. Hal ini disebabkan masih terdapat 1 indikator untuk capaian output yang belum dapat dilaksanakan.

4.2. Kesimpulan

- a) Pada triwulan I tahun, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan jumlah responden pengguna sebanyak 14 orang, dengan nilai hasil survei kepuasan Masyarakat (SMK) terhadap Layanan Pengujian Pascapanen Pertanian adalah sebesar 3,78 indeks
- b) Hasil kegiatan strategis/teknis berupa laporan hasil uji (LHU) dengan target 215 produk, telah terealisasi sebanyak 63 produk (29,30%) dari target;
- c) Realisasi anggaran lingkup BBPM Pascapanen pada Triwulan I tahun 2026 sebesar Rp3.219.275.404,- (20,41%) dari pagu efektif senilai Rp15.776.693.000. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga diharapkan upaya pemecahan masalah di masing-masing bagian/kelompok dapat dilaksanakan dengan baik.

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 3. Survey lapang Kegiatan *Instore Dryer* untuk Pengeringan dan Penyimpanan Benih Padi



Gambar 4. Koordinasi internal & peninjauan terkait desain dan kebutuhan material IoT



Gambar 5. Survei lapang penentuan kapasitas alat yang sesuai dengan kebutuhan operasional, serta pembahasan tata letak (layout)



Gambar 6. koordinasi dan survei lokasi penerapan teknologi Instore Dryer (ID) untuk benih bawang putih